

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).¹

SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahan.²

Di dalam akuntansi pemerintahan, sistem yang digunakan untuk melakukan suatu proses pengklasifikasian dan melakukan ikhtisar terhadap suatu transaksi kegiatan pemerintahan dalam rangka penyusunan laporan keuangan perlu diterapkan dan diselenggarakan. Sistem akuntansi tersebut terdiri

¹Mohammad S. Djanegara, *Laporan Keuanagn Pemerintah Daerah*, (Bogor: Kesatuan Press, 2017), hlm.1

²Musyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 32.

dari tata cara pembukuan dan pelaporan keuangan termasuk di dalamnya mengatur mengenai formulir, buku, daftar yang digunakan, prosedur, dan laporan yang dihasilkan.³

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual (diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi), serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD/APBD.⁴ Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan bank di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.⁶

Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah

³Bahtiar Arif, *Akuntansi Pemerintahan*, (Jakarta Barat: Permata Puri Media, 2009), hlm. 14.

⁴Riyanto & Puji Agus, *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 31.

⁵Mohammad S. Djanegara, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Bogor: Kesatuan Press, 2017), hlm. 2.

⁶Ibid, hlm. 34.

berjalan dengan baik. Hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah/pusat.⁷

Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hanya BPK yang berhak memeriksa LKPD. Di samping itu, jumlah LKPD terus bertambah sejalan dengan pemekaran daerah di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah daerah (pemda) relatif baru mengenal laporan keuangan setelah pelaksanaan otonomi daerah.⁸

Setiap entitas, termasuk pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana (APBD).⁹

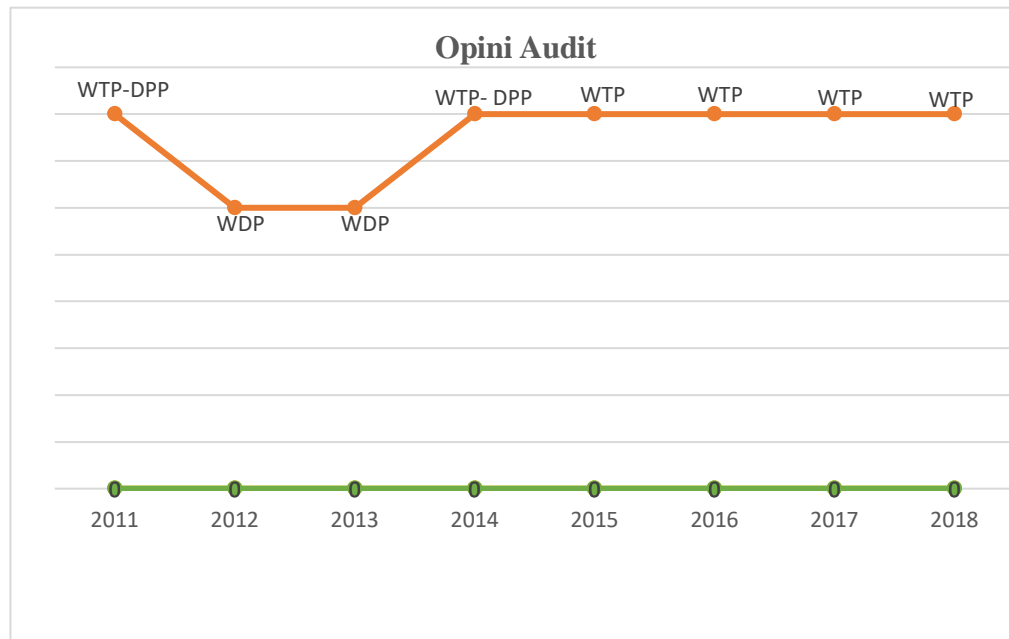
Kabupaten pamekasan merupakan satu – satunya kabupaten di Madura yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut – turut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Salah satu yang melatarbelakangi terjadinya hal tersebut terletak pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Dijelaskan bahwa penetapan APBD tidak melebihi waktu dimana hal tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap perundang – undangan. Yakni, Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara dan tercantum dalam UU 23/20014 tentang Pemerintah Daerah.

⁷Mohammad S. Djanegara, *Laporan Keuanagn Pemerintah Daerah*, (Bogor: Kesatuan Press, 2017), hlm. 2.

⁸Ibid, hlm. 3.

⁹Ibid, hlm. 4.

Berikut merupakan opini audi Pemerintah Kabupaten Pamekasan:



Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan setiap kepala SKPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi:

“Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.”¹⁰

¹⁰Musyidi, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 63.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dari dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Standar dalam pemeriksaan atas pemeriksaan LKPD adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang telah ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007.
2. Sistem pemeriksaan dalam pemeriksaan LKPD tergantung dari sistem pemeriksaan pada organisasi pemeriksaannya. Di BPK, sistem pemeriksaan yang digunakan dalam pemeriksaan LKPD adalah: (1) Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP); (2) Juklak Pemeriksaan Keuangan; (3) Juknis Pemeriksaan LKPD.
3. Kriteria pemeriksaan dalam pemeriksaan LKPD meliputi: (1) Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan dan terkait (termasuk Standar Akuntansi Pemerintah/SAP); (2) Praktik-praktik sehat yang berlaku

disektor pemerintahan. Sampai dengan TA 2008, peraturan perundang-undangan yang secara umum terkait dengan LKPD.¹¹

Tingginya kualitas laporan keuangan ditentukan oleh seberapa baik pengendalian intern yang dimiliki. Pengendalian intern bertujuan untuk menangkal risiko, seperti risiko kecurangan, untuk melindungi asetnya dan menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kesalahan (*error*) maupun kecurangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal pembahasan bahwa setiap perusahaan mempunyai potensi untuk melakukan suatu kecurangan (*fraud*) baik perusahaan kecil maupun perusahaan yang berskala besar.¹²

Pengendalian intern yang lemah dapat menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten.¹³

Struktur pengendalian intern mencakup lima komponen dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Adapun 5 (lima) komponen pengendalian intern tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian

¹¹ M. Yusuf John, Dwi Setiawan S, *Kiat Memahami Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 6-7.

¹² Andrey Haiholan Pulungan dkk, *Akuntansi Keuangan Dasar Berbasis PSAK Per 1 Juni 2012*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 132.

¹³ Ida Ayu Enny Kiranayanti Ni Made Adi Erawati, "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruar terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah."

4. Informasi dan Komunikasi

5. Pemantauan

Kepentingan auditor terutama berkaitan dengan pencegahan atau pendeteksian salah saji yang material dalam laporan keuangan. Dalam perencanaan audit, auditor harus memperoleh suatu pemahaman yang memadai atas komponen pengendalian internal untuk merencanakan audit dengan cara melaksanakan prosedur guna memahami desain pengendalian yang relevan bagi penyusunan laporan keuangan.¹⁴

Salah satu hal yang menjadi perhatian auditor adalah sistem informasi akuntansi dan cara di mana tanggung jawab pengendalian internal atas pelaporan keuangan di komunikasikan di seluruh organisasi. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas, melaporkan, dan menyelenggarakan akuntabilitas terhadap aktiva, ekuitas yang bersangkutan.¹⁵

Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem berdampak pada kemampuan manajemen untuk mengambil keputusan semestinya dalam mengola dan mengendalikan aktivitas entitas dan untuk menyusun laporan keuangan yang andal.¹⁶ Jika pengendalian intern suatu perusahaan lemah, maka kemungkinan

¹⁴ Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati, *Auditing*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 221.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 223.

terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar.¹⁷

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya kesalahan maka dapat dilakukan dengan cara mengetahui hasil pemahaman dan evaluasi atas pengendalian intern perusahaan, apabila auditor menyimpulkan bahwa pengendalian tidak berjalan efektif, maka auditor harus memperluas ruang lingkup pemeriksaannya.¹⁸

Fungsi auditor intern itu sendiri adalah untuk memantau efektivitas kebijakan dan prosedur lain yang berkaitan dengan pengendalian. Adanya staf audit intern yang independen terpisah dari bagian operasi perusahaan dan akuntansi, menjadi penting. Peran auditor yang independen akan sangat penting dalam penerapan *Good Corporate Governance*, anggota auditor internal tidak mempunyai hubungan dengan dewan direksi, komisaris. Sehingga auditor internal dapat berperan dengan maksimal untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*.¹⁹

Selain itu, mekanisme pemantauan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menjadi salah satu praktek strategi khusus untuk melakukan tata kelola yang baik.²⁰

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, di mana terdapat tingkat signifikansi yang berbeda

¹⁷Sukrisno Agoes, *Auditing*, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 75.

¹⁸Ibid.

¹⁹Siti Kurnia & Ely, *Auditing*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 237.

²⁰Ibid.

dari masing-masing variabelatribut kualitas laporan keuangan, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah, penelitian ini menarik untuk menelitikembali faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan khususnya di Kabupaten Pamekasan.²¹

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu *good corporate governance*, peran audit internal, sistem pengendalian intern, dan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. *Good corporate governance* berarti suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola akuntabilitas dengan tujuan utam mempertinggi nilai suatu organisasi ataupun perusahaan.²²

Bukti empiris yang menunjukkan bahwa *good corporate governance* mempunyai pengaruh positif berasal dari penelitian Mursidah dan Khoirina²³, menunjukkan bahwa dengan penerapan *good corporate governance* yang baik maka perusahaan dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparan, akuntanilitas, responsibilitas, indenpendensi, dan wajar maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Diptarina Yasmeeen & Sri Hermawati ²⁴, menunjukkan bahwa

²¹M. Yusuf John, Dwi Setiawan S, *Kiat Memahami Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 8.

²²Khotibul Umam & Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), hlm., 127.

²³Mursidah & Khoirina, Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Perusahaan Asuransi Bumiputera), *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 1, (2014).

²⁴ Diptarina Yasmeeen & Sri Hermawati, Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 20, No.1, (2015).

tidak ada pengaruh positif antara *good corporate governance* dengan kualitas laporan keuangan.

Audit Internal merupakan kegiatan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan tata kelola.²⁵

Bukti empiris yang menunjukkan bahwa audit internal mempunyai pengaruh positif berasal dari penelitian Ade Suherman²⁶, menunjukkan bahwa jika pelaksanaan audit internal ditingkatkan, maka kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan akan lebih maksimal. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nanang Agus Suyono.²⁷

Sistem pengendalian intern merupakan *internal check* atau pengujian kebenaran atas suatu data maupun kebenaran atas pencatatan data. Pengendalian intern tidak hanya sekedar menguji kebenaran data maupun pencatatan saja, namun juga mencakup mekanisme dari seluruh perangkat yang digunakan manajemen untuk melaksanakan fungsi pengawasan.²⁸

²⁵Faiz Zamzami, Ihda Arifin Faiz & Mukhlis, *Audit Internal, Konsep dan Praktik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), hlm., 13.

²⁶Ade Suherman, Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan, *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan* Vol. 6, No. 2, (2018).

²⁷Nanang Agus Suyono, Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal PPKM III*, diakses dari <https://ojs.unsiq.ca.id/index.php/ppkm/article/download/372/198>, pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 19.00.

²⁸Aryanto Mahatmyo, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2014), hlm., 79.

Bukti empiris yang menunjukkan bahwa mempunyai pengaruh positif berasal dari penelitian Sri Rokhlinasari dan Adi Hidayat²⁹, menunjukkan bahwa apabila sistem pengendalian internal dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Desiana Anugrah Budiawan dan Budi S. Purnomo³⁰, mengatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk menulis/mengambil judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, Peran Audit Internal, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Good Corporate Governance*, Audit Internal, dan Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan?

²⁹Sri Rokhlinasari & Adi Hidayat, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan pada Bank BJB Syariah Cirebon, *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 8, No. 2, (2016).

³⁰Desiana Anugrah Budiawan & Budi S. Purnomo, Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kekuatan Koersif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No.1, (2014).

3. Apakah audit internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance*, Audit Internal, dan Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk menguji dan mengevaluasi pengaruh audit internal pengaruh kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Untuk menguji dan mengevaluasi sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian biasa disebut juga sebagai anggapan dasar atau postulat, yaitu sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh peneliti.

Asumsi sangat diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, agar seseorang memiliki dasar berpijak yang kokoh terhadap masalah yang diteliti.

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesis merupakan rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoritis yang diperoleh dari kajian pustaka. Hipotesis diajukan dalam bentuk pernyataan sementara terhadap hasil penelitian, adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

1. H_1 :Penerapan *Good Corporate Governance*, Audit Internal, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2. H_2 :Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3. H_3 :Audit Internal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan.
4. H_4 :Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat dari kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau gagasan terkait dalam penerapan *good corporate governance*, peran audit internal, dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atau masukan yang sangat berguna bagi perkembangan pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam melakukan pembuatan laporan keuangan diharapkan menjadi bahan acuan dan pertimbangan perusahaan dalam menentukan keputusan atau rencana kedepan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi setiap pembaca yang terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Manfaat untuk IAIN Madura

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan bahan referensi perpustakaan IAIN Madura.

4. Manfaat untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan penguat dan informasi bagi peneliti selanjutnya.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian mencakup batasan variabel-variabel yang diteliti dan lokasi penelitian.

1. Variabel Penelitian

a. Variabel Independen (Variabel X)

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu.³¹

Variabel independen pada penelitian ini terdiri atas tiga variabel yaitu *Good Corporate Governance*(X_1), Audit Internal (X_2), dan Sistem Pengendalian Intern (X_3).

b. Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel Dependen merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas.³² Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel yaitu Kualitas Laporan Keuangan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian bagi peneliti yaitu pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan yang terletak di Jl. P. Trunojoyo Gg. 9.

³¹Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012), hlm. 57.

³²Nanang Martono, hlm. 57.

H. Definisi Istilah

1. *Good Corporate Governance*: merupakan prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. *Audit Internal*: merupakan suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi.
3. *Sistem Pengendalian Intern*: merupakan suatu sistem yang digunakan suatu pemerintah agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program yang ditetapkan.
4. *Kualitas Laporan Keuangan*: merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan.